

# LAPORAN INDIVIDU

STUDI LAPANGAN PADA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KULON PROGO  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh: Sigit Erstanto Budi Utomo (Nomor Absen: 13)

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN III  
TAHUN 2020



**BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH V  
YOGYAKARTA**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Oktober 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung terwujudnya *world class bureaucracy*, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat administrator yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan bagi keberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam peningkatan kinerja unit organisasi yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik, merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja unit organisasi. Sosok pejabat administrator yang dapat memainkan peran tersebut adalah pejabat yang telah memenuhi kriteria kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh kualitas manajemen kinerja yang dilakukan oleh pejabat administrator.

Melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini, peserta pelatihan diharapkan mempunyai Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator dan Kompetensi Pemerintahan sebagai Administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Dengan penguasaan kompetensi tersebut secara terintegrasi, diharapkan dapat mewujudkan sosok kepemimpinan berkinerja yang diperoleh melalui PKA yang diindikasikan dengan kemampuan sebagai berikut :

- ) Membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme;
- ) Mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam

rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya.

Selanjutnya menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator di dalam Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Peserta PKA yang selanjutnya disebut Peserta dalam Pelatihan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKA sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini. Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan PKA bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator. Salah satu implelementasi dari pengembangan Kompetensi dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini salah satunya adalah melaksanakan tugas studi lapangan. Kegiatan studi lapangan merupakan salah satu evaluasi terhadap peserta PKA.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup pada Laporan kegiatan Studi Lapangan ini yaitu mengobservasi pengelolaan proses bisnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup deskripsi lokus, deskripsi *lessons learnt* dan deskripsi *action plan* adopsi dan adaptasi di tempat kerja.

## **1.3. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data**

Studi ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara detail fenomena Kepemimpinan Kinerja di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya untuk memahami fenomena tersebut berdasarkan pandangan internal. Obyek studi adalah situasi sosial Kabupaten Kuloprogo dengan sampel adalah narasumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*deep interview*) kepada narasumber terpilih. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan melalui analisis atas dokumen pendukung seperti misalnya bahan tayang, dokumen perencanaan, dan sebagainya.

#### **1.4. Hasil dan Manfaat**

Studi ini diharapkan dapat menghasilkan *lesson learnt* yang berisi informasi atas praktek-praktek kepemimpinan kinerja di Kabupaten Kulon Progo khususnya dalam menghasilkan inovasi-inovasi. Manfaat studi ini adalah adopsi dan adaptasi *lesson learnt* sebagai bahan pengkayaan atas praktek-praktek Kepemimpinan Kinerja.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKUS**

#### **2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo**

Dinas Kesehatan adalah merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai visi menjadi institusi yang profesional dalam mewujudkan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Sedangkan misi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah :

- ) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih bermutu, merata dan terjangkau.
- ) Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

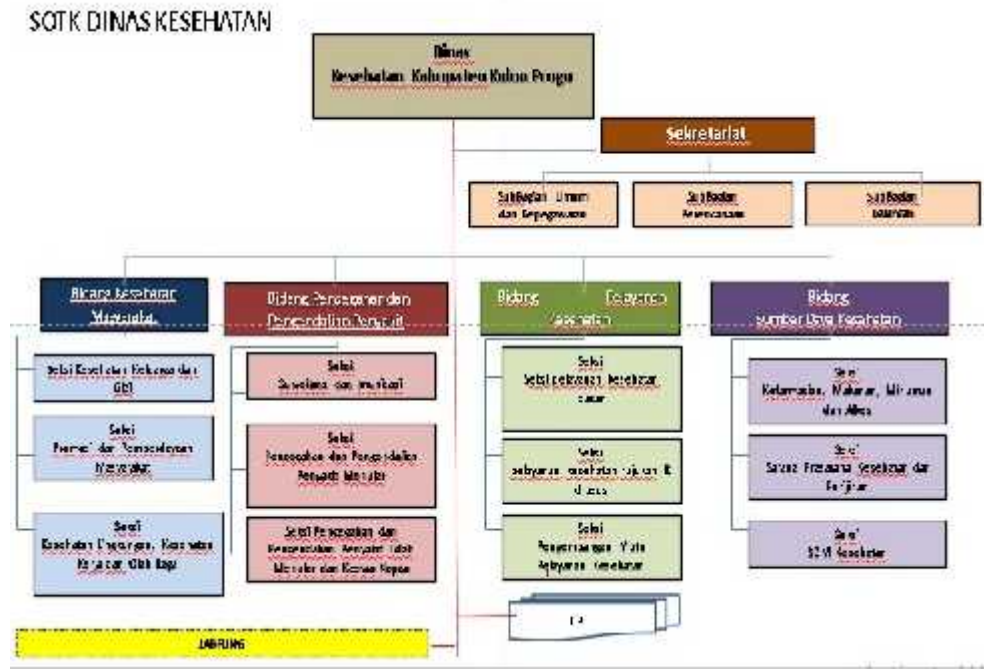
#### **2.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo**

Kedudukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kulon Progo. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- ) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kesehatan;
- ) Menyelenggarakan kegiatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- ) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis
- ) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- ) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

### 2.3. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo



Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah adanya dokter umum, dokter spesialis, tenaga ahli teknologi informasi, pengadministrasian dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana yang ada adalah tersedianya anggaran, fasilitas gedung rumah sakit, perkantoran, server dan lain sebagainya.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI LESSONS LEARNT**

##### **3.1. Umum**

*Lesson learned* adalah inti dari pengalaman suatu kegiatan, baik itu berupa proyek, program, *event*, yang dapat digunakan menjadi pembelajaran pada kegiatan berikutnya. Selanjutnya setiap orang dan fungsi dari organisasi pasti mempunyai *lessons learnt*. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengumpulkan *lessons learnt* dari sebanyak mungkin orang yang terlibat di proyek atau kegiatan tersebut. Akan sangat baik jika *lessons learnt* itu dibuat secara *bottom up*, dari level yang paling bawah dan dikumpulkan setiap level organisasi.

Lokus studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober hingga 7 Oktober 2020 dan merupakan kerjasama antara Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta sebagai penyelenggara pelatihan dengan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya *lessons learnt* dalam laporan ini diambil pada Dinas Kesehatan saja, dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang ditunjuk sebagai lokus studi lapangan.

##### **3.2. Program Rawat Inap Tanpa Kelas**

Program rawat inap tanpa kelas ini bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates yang berada di bawah wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Lebih lanjut mengenai rumah sakit tanpa kelas ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakat miskin, dimana program ini sudah dirintis sejak tahun 2011. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo menerapkan kebijakan jaminan kesehatan bagi semua penduduk Kabupaten Kulon Progo yang belum mendapat jaminan kesehatan dari lembaga/instansi lain (*total coverage*) dengan nama Jamkesda non kartu sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

### **3.3. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Tanpa Dinding**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates juga melakukan inovasi dengan membenahan layanan persalinan ibu dan fasilitas perawatan anak. Inovasi ini dilakukan tidak hanya sekedar untuk menurunkan angka kematian anak, tapi juga meningkatkan kualitas persalinan ibu. Untuk meminimalisir kematian ibu dan anak, RSUD Wates membuat sebuah aplikasi sistem informasi *SMS Gateway* dan *Mediacare Benefits Schedule* (MBS). Hal ini didorong oleh penyebab kematian ibu melahirkan yang masih didominasi perdarahan, sedangkan pada bayi lebih banyak karena bobot lahir rendah. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) tanpa dinding ini sudah masuk pada inovasi Top 99 Sinovik 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan masuk ke dalam tiga puluh tiga inovasi besar nasional bidang inovasi pelayanan publik.

### **3.4. Program Aplikasi Bumilku (Ibu Hamil Kulon Progo)**

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kesehatan telah meluncurkan inovasi berupa aplikasi BumilKu (Ibu Hamil Kulon Progo) yang dicanangkan bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 pada tanggal 12 November 2018 yang merupakan novasi terhadap kesehatan ibu hamil. Aplikasi ini merupakan wujud digitalisasi pemantauan terhadap ibu hamil yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. BumilKu yang merupakan akronim dari Ibu Hamil Kulon Progo ini memuat data digital keseluruhan ibu hamil yang ada di wilayah tersebut berdasarkan data yang diinput oleh bidan pendamping maupun kader kesehatan yang ditugaskan. Letak dan posisi ibu hamil bisa terpantau secara geografis karena telah dilakukan *pointing geospasial*. Sampai saat ini, aplikasi ini telah dikembangkan dengan pendataan dan pemantauan ibu hamil oleh kader kesehatan dengan aplikasi SIKELAMBUSITI, pemantauan ibu nifas dan 1000 hari kehidupan anak dengan aplikasi MATAHATIKU, serta tahap selanjutnya terhubung dengan *Remote Health Care* (RHC) RSUD Wates.



### 3.5. Program Aplikasi SIMOKU

SIMOKU merupakan aplikasi *web base* yang dapat diakses dengan perangkat komputer, laptop, maupun handphone melalui browser yang terhubung dengan jaringan internet. Alamat website SIMOKU yaitu [simoku.kulonprogokab.go.id](http://simoku.kulonprogokab.go.id). Masing-masing pengguna mempunyai user name dan id password. Sebagai admin pada level super admin yaitu programer Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kulon Progo, kemudian untuk kewenangan penambahan data pada master obat diserahkan kepada admin Pengelola Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Pada level Puskesmas, ada admin Puskesmas dan admin unit pelayanan. SIMOKU mengolah data - data dalam proses manajemen pelayanan kefarmasian menjadi informasi - informasi yang dibutuhkan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi yang dapat diambil dari SIMOKU meliputi laporan pengelolaan obat, laporan kegiatan pelayanan farmasi klinis, dan laporan persediaan asset obat. Dalam SIMOKU yang merupakan data adalah semua data yang digunakan dalam proses manajemen pelayanan kefarmasian. Obat yang dimaksud dalam hal ini meliputi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (alat kesehatan *disposable*, *reagen*, dan bahan gigi). Sehingga SIMOKU menjadi aplikasi pengelolaan *e-logistic* farmasi satu pintu. Sebagai identitas, ditambahkan kata Ku yang mewakili nama Kabupaten Kulon Progo.

### 3.6. Inovasi Kesehatan Ibu Anak (RINDU KIA)

RINDU KIA adalah Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak yang merupakan strategi yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi secara cepat dan tepat, sehingga ibu dan bayinya sehat dan selamat dengan melibatkan semua *stakeholder*. RINDU KIA dibentuk di kabupaten yaitu RINDU KIA Kulon Progo dan di dua belas kecamatan. Ada RINDU KIA Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Kokap, Pengasih, Sentolo, Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang, dan RINDU KIA Samigaluh. RINDU KIA Kabupaten beranggota Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Pengelola Program Kesehatan Ibu, Pengelola Kesehatan Anak, Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jajaran Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Wates yang terdiri dari dokter Spesialis Kebidanan, dokter Spesialis Anak, perwakilan dari Poli Kebidanan, IGD,

ICU, NICU, Ruang Persalinan, Ruang Nifas, Kepala Bidang Keperawatan Kebidanan dan Kepala Seksi Kebidanan.

Anggota RINDU KIA tingkat kecamatan terdiri dari Puskesmas yaitu Kepala Puskesmas, semua bidan, dokter umum, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) swasta yang ada di wilayah puskesmas, Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa. Dari Dinas Kesehatan yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Pengelola Program Kesehatan Ibu, Pengelola Program Kesehatan Anak, Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Kepala UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jajaran RSUD Wates yang terdiri dari satu perwakilan IGD, ICU, NICU, Ruang Persalinan, Ruang Nifas, Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan dan Kepala Seksi Kebidanan. RINDU KIA ini berbiaya mandiri. RINDU KIA adalah bentuk kepedulian stakeholder dan masyarakat terhadap keselamatan dan kesehatan ibu hamil ibu bersalin ibu nifas dan bayi. Harapannya semangat RINDU KIA di Kulon Progo tetap menyala, berkomitmen dalam akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi sehingga ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi di Kulon Progo mendapatkan pelayanan standar terbaik, selamat dan sehat.

### **3.7. Komitmen Menciptakan Kawasan Bebas Asap Rokok dengan Program Semarku**

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagai implementasi dari Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Implementasi Undang-Undang tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hampir 25 persen dusun di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerapkan larangan merokok. Sejak 2010, dari yang semula hanya 2 dusun, sudah bertambah menjadi 213 dusun dari 963 dusun yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Penerapan larangan merokok memang tidak berlangsung secara total di masing-masing dusun. Namun, tiap dusun punya aturan main sendiri dalam menerapkan larangan merokok. Misalnya, tidak boleh merokok dalam setiap pertemuan formal.

Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang membahayakan kesehatan. Sebagai tindak lanjut penguatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo melaunching program SEMARKU singkatan dari Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh SEMARKU

antara lain memfasilitasi kegiatan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (KTR), melaksanakan promosi KTR, menyelenggarakan *talkshow* interaktif bulanan di radio Megaswara, serta membuat platform media sosial Facebook dan Instagram untuk melibatkan masyarakat luas. Disisi lain ada enam hal yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni :

- ) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- ) Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- ) Tempat anak bermain;
- ) Tempat ibadah;
- ) Angkutan umum;
- ) Tempat kerja; dan
- ) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI ACTION PLAN ADOPSI DAN ADAPTASI DI TEMPAT KERJA**

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang paling diandalkan, karena banyak mempunyai inovasi untuk mempermudah dalam melayani masyarakat. Diantara inovasi – inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

#### **) Program Rawat Inap Tanpa Kelas**

Dengan kebijakan Program Rawat Inap Tanpa Kelas ini semua penduduk Kabupaten Kulon Progo diberikan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kulon Progo. Selain kebijakan *total coverage*, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo juga menerapkan kebijakan pelayanan rawat inap tanpa kelas bagi keluarga miskin di RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang. Kebijakan ini sudah masuk putaran kedua kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nation Public Service Award* (UNPSA). Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dapat memberikan :

- Pelayanan yang prima terhadap para peserta pelatihan dan para pengajar pelatihan;
- Penyederhanaan SOP dalam hal pembelajaran pelatihan dengan tidak mengurangi mutu pelatihan.

Hal ini jika dikaitkan dengan Agenda Kepemimpinan Kinerja merupakan implementasi dari manajemen perubahan sektor publik dan komunikasi efektif.

#### **) Program Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Tanpa Dinding**

Di dalam pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Tanpa Dinding ini adalah untuk meminimalisir kematian ibu dan anak, Rumah Wates membuat sebuah aplikasi sistem informasi SMS *Gateway* dan *Mediacare Benefits Schedule* (MBS). Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dapat memberikan :

- Pelayanan pelaksanaan pelatihan dengan sistem informasi teknologi;
- Penyimpanan data dengan sistem informasi teknologi, baik itu data modul pelatihan maupun data administrasi pelatihan yang lain ;

- o Adanya petugas pelaksana sistem informasi teknologi;
- o Adanya SOP penggantian petugas apabila terjadi pergantian petugas;
- o Adanya kriteria petugas pengelola data sistem informasi teknologi.

Hal ini jika dikaitkan dengan Agenda Kepemimpinan Kinerja merupakan implementasi dari manajemen perubahan sektor publik dan komunikasi efektif.

#### ) Program Aplikasi Bumilku (Ibu Hamil Kulon Progo)

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kesehatan telah meluncurkan inovasi berupa aplikasi BumilKu (Ibu Hamil Kulon Progo). Aplikasi ini merupakan wujud digitalisasi pemantauan terhadap ibu hamil yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Letak dan posisi ibu hamil bisa terpantau secara geografis karena telah dilakukan *pointing geospasial*. Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dapat memberikan :

- o Pemantauan terhadap para alumni pelatihan terkait posisi unit kerja;
- o Pemantauan terhadap para alumni pelatihan terkait posisi karier selanjutnya apabila terjadi mutasi jabatan.

Hal ini jika dikaitkan dengan Agenda Kepemimpinan Kinerja merupakan implementasi dari manajemen perubahan sektor publik, komunikasi efektif dan jejaring kerja.

#### ) Program Aplikasi SIMOKU

SIMOKU merupakan aplikasi *web base* yang dapat diakses dengan perangkat komputer, laptop, maupun handphone melalui browser yang terhubung dengan jaringan internet. Alamat website SIMOKU yaitu [simoku.kulonprogokab.go.id](http://simoku.kulonprogokab.go.id). Masing-masing pengguna mempunyai user name dan id password. SIMOKU mengolah data - data dalam proses manajemen pelayanan kefarmasian menjadi informasi - informasi yang dibutuhkan. Program ini jika diadopsi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dengan memberikan :

- o Pelayanan data baik itu berupa data pelatihan maupun data administrasi lainnya;
- o Pelayanan kemudahan untuk mengakses data tersebut.

Hal ini jika dikaitkan dengan Agenda Kepemimpinan Kinerja merupakan implementasi dari manajemen perubahan sektor publik, komunikasi efektif dan jejaring kerja.

) Inovasi Kesehatan Ibu Anak (RINDU KIA)

RINDU KIA adalah Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak yang merupakan strategi yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi secara cepat dan tepat, sehingga ibu dan bayinya sehat dan selamat dengan melibatkan semua *stakeholder*. Program ini jika diadopsi/adaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dengan melakukan kerjasama dengan instansi lainnya baik di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dengan instansi daerah, kerjasama bisa berupa pengaturan jadwal peserta yang akan mengikuti pelatihan, sehingga penyelenggara diklat dapat mengetahui calon peserta yang akan mengikuti pelatihan. Hal ini jika dikaitkan dengan Agenda Kepemimpinan Kinerja merupakan implementasi dari manajemen perubahan sektor publik, komunikasi efektif dan jejaring kerja.

) Komitmen Menciptakan Kawasan Bebas Asap Rokok dengan Program Semarku

Tujuan Program Semarku adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang membahayakan kesehatan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh SEMARKU antara lain memfasilitasi kegiatan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (KTR), melaksanakan promosi KTR, menyelenggarakan *talkshow* interaktif bulanan di radio Megaswara, serta membuat platform media sosial Facebook dan Instagram untuk melibatkan masyarakat luas. Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dengan memberikan :

- o Pelayanan kepada peserta pelatihan dengan menggunakan media sosial;
- o Dengan melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi dalam rangka melakukan sosialisasi program – program pelatihan.

Hal ini jika dikaitkan dengan Agenda Kepemimpinan Kinerja merupakan implementasi dari manajemen perubahan sektor publik, komunikasi efektif dan jejaring kerja serta kepemimpinan transformasional.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Diantara Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kesehatan banyak mempunyai inovasi untuk mempermudah dalam melayani masyarakat, yang selanjutnya dapat diadopsi/diadaptasi oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya sebagai berikut yaitu :

) **Program Rawat Inap Tanpa Kelas**

Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dapat memberikan :

- o Pelayanan yang prima terhadap para peserta pelatihan dan para pengajar pelatihan;
- o Penyederhanaan SOP dalam hal pembelajaran pelatihan dengan tidak mengurangi mutu pelatihan.

) **Program Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Tanpa Dinding**

Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dapat memberikan :

- o Pelayanan pelaksanaan pelatihan dengan sistem informasi teknologi;
- o Penyimpanan data dengan sistem informasi teknologi, baik itu data modul pelatihan maupun data administrasi pelatihan yang lain ;
- o Adanya petugas pelaksana sistem informasi teknologi;
- o Adanya SOP penggantian petugas apabila terjadi pergantian petugas;
- o Adanya kriteria petugas pengelola data sistem informasi teknologi.

) **Program Aplikasi Bumilku (Ibu Hamil Kulon Progo)**

Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dapat memberikan :

- o Pemantauan terhadap para alumni pelatihan terkait posisi unit kerja;
- o Pemantauan terhadap para alumni pelatihan terkait posisi karier selanjutnya apabila terjadi mutasi jabatan.

) **Program Aplikasi SIMOKU**

Program ini jika diadopsi/diadaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dengan memberikan :

- o Pelayanan data baik itu berupa data pelatihan maupun data administrasi lainnya;

- Pelayanan kemudahan untuk mengakses data tersebut.

) Inovasi Kesehatan Ibu Anak (RINDU KIA)

Program ini jika diadopsi/adaptasi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dengan melakukan kerjasama dengan instansi lainnya baik di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dengan instansi daerah, kerjasama bisa berupa pengaturan jadwal peserta yang akan mengikuti pelatihan, sehingga penyelenggara diklat dapat mengetahui calon peserta yang akan mengikuti pelatihan.

) Komitmen Menciptakan Kawasan Bebas Asap Rokok dengan Program Semarku

Program ini jika diadopsi pada lingkungan tempat kerja yaitu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dengan memberikan :

- Pelayanan kepada peserta pelatihan dengan menggunakan media sosial;
- Dengan melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi dalam rangka melakukan sosialisasi program – program pelatihan.

Hal ini jika dikaitkan dengan Agenda Kepemimpinan Kinerja merupakan implementasi dari manajemen perubahan sektor publik, komunikasi efektif dan jejaring kerja serta kepemimpinan transformasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008 / K.1 / PDP.07 / 2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017 – 2022;

oOo